

RESUME

Masalah *human trafficking* dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik *human trafficking*. Secara normatif, aturan-aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi *human trafficking*, tetapi hal ini masih tetap berlangsung.

Perbedaan data mengenai korban *human trafficking* di Sri Lanka sebenarnya lazim terjadi di berbagai negara dunia, namun yang perlu menjadi perhatian adalah, baik data versi pemerintah ataupun NGO sama-sama menyatakan jumlah korban *human trafficking* di Sri Lanka mencapai ribuan orang. Ini tentunya menjadi fenomena sosial internasional yang menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan *human trafficking* di Sri Lanka menjadi begitu sulit ditangani sehingga kebijakan-kebijakan sebelum masa kepemimpinan Mahinda Rajapaksa gagal.

Dalam menghadapi masalah *human trafficking* yang semakin meningkat, pemerintah Sri Lanka menjalankan kebijakan (kebijakan publik) yang mana pada awalnya kebijakan tersebut hanyalah terbatas pada masalah pertahanan negara, hubungan luar negeri, dan masalah-masalah mempertahankan hukum dan ketertiban. Namun saat ini area kebijakan publik telah mencakup berbagai bidang seperti: pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, industry, perdagangan, maupun transportasi. Kebijakan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kebijakan internal (*defensive*) dan kebijakan eksternal (*offensive*). Kebijakan internal adalah mengembalikan kedaulatan internal kepada pemerintah nasional.